

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Kegunaan Keputusan (*Decision-Usefulness Theory*)

Teori induk yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kegunaan keputusan (*decision-usefulness theory*). Menurut Staubus (2000), teori kegunaan keputusan menjadi referensi dari penyusunan kerangka konseptual *Financial Accounting Standard Boards* (FASB), yaitu *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) yang berlaku di Amerika Serikat. Teori ini pada awalnya dikenal dengan nama *A Theory of Accounting to Investors*. Freeman and Shoulder dalam Toban (2017) mengatakan bahwa selain FASB, ada sebuah badan yang setara dengan FASB yaitu GASB. GASB bertanggungjawab untuk menetapkan standar akuntansi untuk aktivitas dan transaksi dari pemerintah pusat dan daerah, sedangkan FASB menyusun standar akuntansi untuk semua organisasi lainnya termasuk non pemerintahan dan organisasi non profit.

Teori kegunaan keputusan informasi akuntansi ini harus mengandung komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan oleh para penyaji informasi akuntansi agar cakupan yang ada dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan menggunakannya. SFAC No. 2 tentang *Qualitative Characteristics of Accounting Information* menggambarkan hierarki dari kualitas informasi akuntansi dalam bentuk kualitas primer, kandungannya dan kualitas sekunder. Kualitas primer dari informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi adalah nilai relevan (*relevance*) dan reliabilitas (*reliability*).

FASB menyatakan bahwa nilai relevan dan reliabilitas adalah dua kualitas utama yang membuat informasi akuntansi berguna dalam pengambilan keputusan. Nilai relevan diklasifikasikan sebagai kapasitas informasi untuk membuat suatu perbedaan dalam pengambilan keputusan oleh pemakai. Reliabilitas didefinisikan sebagai kualitas pemberian jaminan bahwa informasi tersebut secara rasional bebas dari kesalahan dan bias, dan mewakili apa yang akan digambarkan. FASB menyatakan bahwa agar menjadi relevan bagi investor, kreditur, dan yang lain dalam rangka investasi, kredit, dan keputusan sejenis maka informasi akuntansi harus memiliki kapabilitas untuk membuat suatu perbedaan pada suatu keputusan. Hal tersebut dicapai dengan cara membantu pemakai dalam membentuk prediksi tentang hasil dari kejadian masa lalu, sekarang dan yang akan datang atau untuk mengkonfirmasi atau membenarkan harapannya.

Kandungan kualitas primer kegunaan-kegunaan informasi akuntansi meliputi komponen-komponen kandungan dari nilai relevan, yaitu ketepatanwaktuan (*timeliness*), nilai umpan balik (*feed-back value*), dan nilai prediktif (*predictive value*). Sedangkan komponen-komponen kandungan reliabilitas, yaitu penggambaran yang senyatanya (*representational faithfulness*), netralitas (*neutrality*), dan dapat diperiksa (*verifiability*). Selain itu juga terdapat kualitas sekunder, sebagai penghubung antara kualitas primer, yaitu komparabilitas (*comparability*) dan taat asas (*consistency*).

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang terkandung dalam Undang-Undang No. 71 tahun 2010 mengadopsi karakteristik kualitatif primer

sebagaimana tercantum dalam SFAC No. 2. Hanya saja SAP menekankan pada empat prasyarat normatif yakni: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

2.2. Pemerintah Daerah

Berdasarkan pasal 18 ayat (5) UUD 1945, pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang diatur oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan khususnya pemerintah daerah, memiliki kaitan atau hubungan yang sangat erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara, yaitu:

1. Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonom.

2. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu,

dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

3. Asas Tugas Pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dengan tujuan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau tugas yang diberikan oleh pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki beberapa fungsi, antara lain:

1. Pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonom dan asas pembantuan.

2.3. Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan bahwa organisasi perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan. Berdasarkan pada PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perangkat daerah memiliki fungsi dan juga tugas masing-masing. Fungsi sekretariat daerah adalah berkewajiban untuk membantu gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah, sekretariat DPRD bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Berbeda dengan inspektorat yang berfungsi sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan yang terlaksana di daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dan yang terakhir, dinas yang bertugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang didasari oleh asas otonom dan tugas pembantuan.

2.4. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan produk akhir dari suatu proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan merupakan informasi yang menunjukkan bagaimana kondisi keuangan suatu entitas yang berkaitan dengan posisi dan kinerja keuangan entitas (Yadiati dan Mubarok, 2017). Menurut Erlina, dkk (2015) laporan keuangan pemerintah daerah merupakan suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam

rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Tujuan laporan keuangan secara umum adalah untuk menyajikan kewajaran posisi keuangan, kinerja, dan perubahan dalam posisi keuangan lainnya berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.

Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pelaporan keuangan pemerintah secara spesifik memiliki tujuan untuk menyediakan informasi yang berguna bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan sebagai pengambilan keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik, dengan :

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan keuangan untuk para pemangku kepentingan disajikan bukan untuk mempersulit ataupun membingungkan pembacanya melainkan untuk membantu para pemangku kepentingan dalam membuat suatu keputusan baik itu keputusan sosial, politik, bahkan ekonomi sehingga keputusan yang diambil berkualitas (Mahmudi, 2010). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan memiliki tujuan supaya memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, berhubung laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan keuangan yang disajikan setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan laporan keuangan sebagaimana terdapat dalam paragraf sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Sebagai informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan bisa dilaporkan secara bersamaan dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

2.5. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran

normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga tujuannya dapat terpenuhi. Ada empat karakteristik kualitatif laporan keuangan yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan supaya laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang diinginkan. Adapun karakteristik yang dimaksud antara lain:

1. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan jika informasi yang tercantum didalamnya bisa mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa yang terjadi di masa lalu ataupun di masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi kembali hasil evaluasi mereka yang dilakukan di masa lalu. Sehingga informasi laporan keuangan yang relevan bisa dihubungkan dengan tujuan dan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan memiliki kriteria sebagai berikut:

a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan dan mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi yang disajikan dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang dengan menggunakan hasil di masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga hasilnya dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Berikut ini merupakan karakteristik informasi yang andal:

a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan semua transaksi dengan jujur begitu juga dengan peristiwa lainnya yang disajikan sebagaimana mestinya atau disajikan secara wajar sebagaimana yang diharapkan.

b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan ketika informasi yang disajikan diuji kembali oleh pihak yang berbeda lebih dari sekali, maka hasil pengujiannya menunjukkan kesimpulan yang tetap sama atau tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi yang disajikan harus bersifat netral dan tidak berpihak kepada pihak tertentu karena informasi yang disajikan diarahkan pada kebutuhan umum.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang tercantum didalam laporan keuangan akan lebih bermanfaat ketika informasi tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan ini bisa dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Perbandingan secara internal bisa dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Sedangkan perbandingan eksternal bisa dilakukan bila suatu entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahsun, dkk (2012), informasi yang termuat didalam laporan keuangan pemerintah memiliki tujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk memperhatikan setiap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang bertujuan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Adapun faktor-faktor yang dapat menjelaskan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini yaitu kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal.

2.6.1. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) No. 46 A Tahun 2007 tentang Pedoman Penyuluhan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil pengertian kompetensi sumber daya manusia adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kemampuan dan karakteristik berupa

pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Dapat dikatakan juga bahwa kompetensi merupakan kemampuan dasar seseorang yang memungkinkan seseorang itu mengeluarkan seluruh kinerja dalam pekerjaannya dimana makna kompetensi ini mengandung bagian kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang dengan perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas kepercayaan. Oleh karena itu, kriteria atau standar yang digunakan akan dapat memprediksi siapa yang memiliki kinerja yang baik maupun kurang baik.

Riwukaho dalam Hanaffi (2017) berpendapat bahwa sumber daya manusia adalah salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi otonomi daerah. Sumber daya manusia atau personalia adalah faktor penentu yang harus tersedia dan melekat dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah selain faktor pembiayaan dan prasarana. Sehingga dengan adanya kompetensi sumber daya manusia maka waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan akan lebih hemat. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia tersebut memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal apa saja yang harus dilakukan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya. Pengambilan keputusan akan semakin baik apabila laporan keuangan disajikan lebih cepat dari waktu yang ditentukan (Mardiasmo, 2002).

Havesi dalam Toban (2017) mengatakan bahwa untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi, sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu organisasi harus memiliki daya kompetensi yang tinggi. Selain itu, sumber daya

manusia juga harus memiliki faktor penting seperti pengetahuan dan kemampuan untuk menilai kualitas sumber daya manusia yang efektif bagi suatu organisasi. Pengetahuan dan kemampuan merupakan sumber daya paling unik dan dapat diperbaharui yang dapat dimanfaatkan oleh suatu organisasi. Modal manusia (*human capital*) atau lebih luas lagi modal intelektual (*intellectual capital*) seringkali digunakan untuk menjelaskan nilai strategis dari pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia suatu organisasi (Beteman dan Scott, 2009). Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang memadai akan susah dalam mengerjakan pekerjaannya dan juga akan menyebabkan pemborosan bahan, waktu maupun tenaga dan pada akhirnya kualitas informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi akan menjadi buruk. Warisno dalam Hanaffi (2017) menyatakan bahwa kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

2.6.2. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Informasi merupakan data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian sesuai dengan fakta yang digunakan untuk pengambilan keputusan (Hartono, 1988). Kualitas dari suatu informasi tergantung pada tiga hal, antara lain:

1. Akurat

Akurat berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan dan informasi yang disajikan harus mencerminkan maksud yang jelas. Informasi harus akurat karena dimungkinkan adanya gangguan yang terjadi dari sumber informasi sampai ke penerima informasi yang dapat merubah atau merusak informasi tersebut.

2. Tepat pada waktunya

Tepat pada waktunya berarti informasi yang datang pada penerima tidak dapat terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi karena informasi merupakan landasan dalam pengambilan keputusan. Apabila pengambilan keputusan terlambat, maka dapat berakibat fatal untuk organisasi. Penyebab mahalnya nilai informasi adalah cepat atau lambatnya informasi tersebut diperoleh, sehingga diperlukan teknologi-teknologi mutakhir/terbaru untuk mendapatkan, mengolah, dan mengirimkannya.

3. Relevan

Relevan berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan yang lainnya berbeda.

Menurut Wilkinson *et al* (2000), pemanfaatan teknologi informasi secara optimal adalah penggunaan dari komputer, perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*intranet, internet*), *electronic commerce*, dan juga jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Teknologi informasi sangat membantu manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi untuk menjalankan sistem informasi

komputer yang terintegrasi yang didesain untuk menyediakan data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan sumber daya manusia. Teknologi informasi dapat memungkinkan para atasan terhubung lebih baik dengan para karyawan dan lingkungan sekitar organisasi. Teknologi informasi juga memiliki implikasi-implikasi yang positif untuk praktik manajemen, walaupun juga bisa menghadirkan berbagai masalah (Daft, 2008).

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Penjelasan dalam PP No. 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang berguna untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan kepada pelayan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintah bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya pengelolaan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen, dan proses kerja secara elektronik, dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat (Wilkinson *et al*, 2000).

2.6.3. Sistem Pengendalian Internal

Menurut PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) definisi pengendalian internal adalah proses secara integral terhadap tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pemimpin dan seluruh pegawai dengan tujuan memberikan keyakinan yang memadai terhadap tujuan organisasi yang telah dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dikatakan bahwa pengendalian internal sebagai suatu proses yang dilaksanakan untuk mengawasi, mengarahkan, dan juga mengukur sumber daya suatu organisasi, serta memiliki peran yang penting dalam mencegah dan mendeteksi terjadinya kecurangan (*fraud*) dan penyimpangan sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan menyatakan bahwa sistem pengendalian internal memiliki unsur-unsur yang terdiri dari:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control environment*)

Lingkungan pengendalian menunjukkan atmosfer atau suasana (*sets the tone*) dalam suatu organisasi/perusahaan yang mempengaruhi kesadaran pengendalian (*control consciousness*) dari orang-orang dalam organisasi tersebut. Lingkungan pengendalian adalah dasar bagi komponen pengendalian internal yang lain, menyediakan disiplin dan struktur.

Pimpinan dan pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian dalam seluruh kegiatan organisasi.

2. Penilaian Risiko (*Risk assessment*)

Penilaian risiko merupakan suatu cara untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan juga mengelola seluruh risiko yang terjadi dalam organisasi dan tidak melupakan visi dan misi organisasi yang ingin dicapai.

3. Kegiatan Pengendalian (*Control activities*)

Kegiatan pengendalian dilakukan untuk memastikan bahwa arahan pemimpin instansi pemerintah telah dilaksanakan dalam mencapai tujuan organisasi. Yang termasuk dalam kegiatan pengendalian adalah pembinaan sumber daya manusia, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, pengendalian fisik atas aset, pemisahan fungsi (*cut off*), pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal, serta transaksi dan kejadian penting lainnya.

4. Informasi dan Komunikasi (*Information and communication*)

Sistem informasi dan komunikasi memungkinkan orang-orang dalam organisasi untuk memperoleh dan berbagi informasi yang diperlukan untuk mengelola, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan operasional.

5. Pengawasan (*Monitoring*)

Pengawasan merupakan proses penilaian terhadap kualitas dan efektivitas dari sistem pengendalian internal, termasuk modifikasi dan penyempurnaannya apabila diperlukan. Antara ketiga tujuan yang harus dicapai dengan kelima komponen pengendalian internal, terdapat hubungan langsung yaitu menunjukkan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

Menurut Mulyadi (2009), ada beberapa hal yang harus diterapkan dalam pengendalian internal agar bisa berjalan dengan baik dan efektif, antara lain:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas;
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya;
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi; dan
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab.

Sistem pengendalian internal merupakan kegiatan pengendalian terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. Yang termasuk dalam kegiatan pengendalian atas pengelolaan informasi meliputi:

1. Pengendalian Umum

Pengendalian ini meliputi pengaman sistem informasi, pengendalian atas akses, pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi, pengendalian atas perangkat lunak sistem, pemisahan tugas (*cut off*), dan pelayanan secara berkelanjutan.

2. Pengendalian Aplikasi

Pengendalian ini meliputi pengendalian otorisasi, pengendalian kelengkapan, pengendalian akurasi, dan pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data.

Agung dan Gayatri, (2018) menjelaskan bahwa melalui sistem pengendalian internal yang baik akan mengurangi risiko adanya kekeliruan, kesalahan-kesalahan kecil bahkan kecurangan (*fraud*) dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan sehingga kualitas laporan keuangan yang disajikan pun akan lebih baik dan berkualitas. Apabila sistem pengendalian internal yang didesain dengan baik sejalan dengan bagian-bagian dan fungsi-fungsi terikat yang berintegritas dan bertanggung jawab dengan masing-masing tugas dan tanggung jawabnya maka sistem yang telah didesain pun dapat berjalan dengan baik pula.

2.7. Kerangka Konseptual

2.7.1. Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber daya manusia atau personalia adalah faktor penentu yang harus tersedia dan melekat dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah selain faktor

pembiayaan dan prasarana. Sehingga dengan adanya kompetensi sumber daya manusia maka waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan akan lebih hemat. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia tersebut memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal apa saja yang harus dilakukan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya. Pengambilan keputusan akan semakin baik apabila laporan keuangan disajikan lebih cepat dari waktu yang ditentukan (Mardiasmo, 2002).

Havesi dalam Toban (2017) mengatakan bahwa untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi, sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu organisasi harus memiliki daya kompetensi yang tinggi. Warisno dalam Hanaffi (2017) menyatakan bahwa kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

2.7.2. Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penjelasan dalam PP No. 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang berguna untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan kepada pelayan

publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintah bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya pengelolaan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen, dan proses kerja secara elektronik, dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat (Wilkinson *et al*, 2000).

Teknologi informasi sangat membantu manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi untuk menjalankan sistem informasi komputer yang terintegrasi yang didesain untuk menyediakan data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan sumber daya manusia. Teknologi informasi dapat memungkinkan para atasan terhubung lebih baik dengan para karyawan dan lingkungan sekitar organisasi. Teknologi informasi juga memiliki implikasi-implikasi yang positif untuk praktik manajemen, walaupun juga bisa menghadirkan berbagai masalah (Daft, 2008).

2.7.3. Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem pengendalian internal (SPI) yang efektif berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, hal ini sesuai dengan pasal 134 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yaitu untuk peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,

Gubernur/Bupati/Walikota mengatur dan menyelenggarakan SPI di lingkungan yang dipimpinnya. Sistem pengendalian internal memadai apabila unsur-unsur dalam SPI menyajikan suatu pengendalian yang saling terkait dan dapat meyakinkan pengguna bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Lingkungan pengendalian yang diciptakan seharusnya menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan SPI, hal ini dapat dilihat berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHSP). Tujuan didesainnya SPI ini adalah untuk mengetahui apakah SPI telah memadai dan mampu untuk mendeteksi adanya kelemahan. Kelemahan yang dimaksud adalah kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, sistem pengendalian anggaran pendapatan belanja, dan kelemahan struktur pengendalian internal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal yang dijalankan dan diterapkan dengan baik maka akan berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Agung dan Gayatri (2018) menjelaskan bahwa melalui sistem pengendalian internal yang baik akan mengurangi risiko adanya kekeliruan, kesalahan-kesalahan kecil bahkan kecurangan (*fraud*) dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan sehingga kualitas laporan keuangan yang disajikan pun akan lebih baik dan berkualitas. Apabila sistem pengendalian internal yang didesain dengan baik sejalan dengan bagian-bagian dan fungsi-fungsi terikat yang berintegritas dan bertanggung jawab dengan masing-masing tugas dan tanggung jawabnya maka sistem yang telah didesain pun dapat berjalan dengan baik pula.

2.8. Penelitian Terdahulu

Setyowati, dkk (2016) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Semarang. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa peran teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan peran internal audit berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Semarang. Manullang (2016) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada pemerintah kota Tebing Tinggi dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderating. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, kualitas sumber daya manusia, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada pemerintah kota Tebing Tinggi, serta komitmen organisasi mampu memoderasi implementasi standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, kualitas sumber daya manusia, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada pemerintah kota Tebing Tinggi.

Yuliani, dkk (2016) meneliti tentang faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitiannya adalah sistem akuntansi keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah. Toban (2017) meneliti tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara. Hasilnya menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara.

Hanaffi (2017) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Pati). Hasilnya menyatakan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan, peran internal audit, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pemahaman sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Oktavianti, dkk (2017) meneliti pengaruh pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, dan budaya etis organisasi terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus koperasi simpan pinjam di Kecamatan Buleleng). Hasil penelitiannya adalah pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, dan budaya etis organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Terakhir, penelitian Agung dan Gayatri (2017) tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Karangasem. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa gaya kepemimpinan, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, dan pemanfaatan teknologi informasi

berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Karangasem.



Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Variabel	Objek	Hasil Penelitian
Setyowati, dkk (2016)	Variabel independen: X1 : Peran Teknologi Informasi X2 : Kompetensi SDM X3 : Peran Internal Audit Variabel dependen: Y : Kualitas Laporan Keuangan	Pemerintah daerah kota Semarang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran teknologi informasi berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan 2. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan 3. Peran internal audit berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan
Manullang (2016)	Variabel independen: X1 : Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan X2 : Sistem Pengendalian Intern X3 : Kualitas SDM X4 : Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan X5 : Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Z1 : Komitmen Organisasi Variabel dependen: Y : Kualitas Laporan Keuangan	Pemerintah Kota Tebing Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan 2. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan 3. Kualitas SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan 4. Kepatuhan terhadap perundang-undangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan 5. Sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan 6. Komitmen organisasi mampu memoderasi implementasi standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, kualitas sumber daya manusia, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan
Yuliani, dkk (2016)	Variabel independen: X1 : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah X2 : Pemanfaatan Teknologi Informasi X3 : Kompetensi SDM	Pemerintah daerah Kabupaten Magelang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan 2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif

	<p>X4 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan X5 : Pengendalian Intern</p> <p>Variabel dependen: Y : Kualitas Laporan Keuangan</p>		<p>terhadap kualitas laporan keuangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Kompetensi SDM berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan 4. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan 5. Pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan
Toban (2017)	<p>Variabel independen: X1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia X2 : Pemanfaatan Teknologi Informasi X3 : Sistem Pengendalian Internal</p> <p>Variabel dependen: Y : Kualitas informasi laporan keuangan</p>	Pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan 2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan 3. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan
Hanaffi (2017)	<p>Variabel independen: X1 : Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan X2 : Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah X3 : Peran Internal Audit X4 : Kompetensi Sumber Daya Manusia</p> <p>Variabel dependen: Y : Kualitas Laporan Keuangan</p>	Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di Kabupaten Pati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman sistem akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan 2. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan 3. Peran internal audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan 4. Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan
Oktaviyanti, dkk (2017)	<p>Variabel independen: X1 : Pengendalian Internal X2 : Kompetensi SDM X3 : Budaya Etis Organisasi</p> <p>Variabel dependen: Y : Kualitas Laporan Keuangan</p>	Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Buleleng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan 2. Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan 3. Budaya etis organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan
Agung dan Gayatri (2018)	<p>Variabel independen: X1 : Gaya Kepemimpinan X2 : Kompetensi SDM X3 : Sistem Pengendalian Internal</p>	Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan 2. Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

	X4 : Komitmen Organisasi X5 : Pemanfaatan Teknologi Informasi Variabel dependen: Y : Kualitas Laporan Keuangan	Kabupaten Karangasem	3. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan 4. Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan 5. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan
--	---	----------------------	--

Sumber : Penelitian Terdahulu

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber daya manusia atau personalia adalah faktor penentu yang harus tersedia dan melekat dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah selain faktor pembiayaan dan prasarana. Sehingga dengan adanya kompetensi sumber daya manusia maka waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan akan lebih hemat. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia tersebut memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal apa saja yang harus dilakukan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya. Pengambilan keputusan akan semakin baik apabila laporan keuangan disajikan lebih cepat dari waktu yang ditentukan (Mardiasmo, 2002).

Penelitian yang dilakukan Setyowati, dkk (2016) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Semarang. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Agung dan Gayatri (2018) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Kabupaten Karangasem, begitu juga dengan penelitian Oktaviyanti, dkk (2017) membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, serta hasil penelitian Manullang (2016) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Tebing Tinggi. Terakhir, penelitian Toban (2017) juga menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis untuk penelitian ini yaitu:

H_{a1} : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2.9.2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Penjelasan dalam PP No. 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang berguna untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan kepada pelayan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun

jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintah bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya pengelolaan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen, dan proses kerja secara elektronik, dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat (Wilkinson *et al*, 2000).

Teknologi informasi sangat membantu manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi untuk menjalankan sistem informasi komputer yang terintegrasi yang didesain untuk menyediakan data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan sumber daya manusia. Teknologi informasi dapat memungkinkan para atasan terhubung lebih baik dengan para karyawan dan lingkungan sekitar organisasi. Teknologi informasi juga memiliki implikasi-implikasi yang positif untuk praktik manajemen, walaupun juga bisa menghadirkan berbagai masalah (Daft, 2008).

Penelitian yang dilakukan Setyowati, dkk (2016) menyatakan bahwa peran teknologi informasi berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan Yuliani, dkk (2016) juga menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu, penelitian Agung dan Gayatri (2018) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, serta penelitian Toban (2017) juga membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan

keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H_{a2} : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2.9.3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem pengendalian internal (SPI) yang efektif berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, hal ini sesuai dengan pasal 134 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yaitu untuk peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Gubernur/Bupati/Walikota mengatur dan menyelenggarakan SPI di lingkungan yang dipimpinnya. Sistem pengendalian internal memadai apabila unsur-unsur dalam SPI menyajikan suatu pengendalian yang saling terkait dan dapat meyakinkan pengguna bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Agung dan Gayatri (2018) menjelaskan bahwa melalui sistem pengendalian internal yang baik akan mengurangi risiko adanya kekeliruan, kesalahan-kesalahan kecil bahkan kecurangan (*fraud*) dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan sehingga kualitas laporan keuangan yang disajikan pun akan lebih baik dan berkualitas. Apabila sistem pengendalian internal yang didesain dengan baik sejalan dengan bagian-bagian dan fungsi-fungsi terikat yang berintegritas dan bertanggung jawab dengan masing-masing tugas dan tanggung jawabnya maka sistem yang telah didesain pun dapat berjalan dengan baik pula.

Hasil penelitian oleh Manullang (2016) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, Penelitian Agung dan Gayatri (2018) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Karangasem. Begitu juga dengan penelitian Toban (2017) yang berpendapat bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara. Dengan demikian hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H_{a3} : Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

